

Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015, *Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Ditjen PP, Jakarta

Esmi Warrassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Cet. I, Suryandaru Utama, Semarang

I.C Van der Vlies, 1984, *Het Wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, s-Granvenhage:Vuga

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

Jimly Asshiddiqie & M.Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen*, Penerbit Sekretariat Jenderal &Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

J.C.T. Simorangkir, dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti

J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta

J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Juanda,2008, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung.

Juhaya S.Praja, 1993, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, 2015, Laporan Tahun Kanwil Jawa Tengah 2015

King Faisal Sulaiman, 2014, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.xx

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: Social Science Perspective*, New York: Russel sage Foundation

Maleong, Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2002, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, cet.5, Kanisius, Yogyakarta

_____, 2007, Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan), Kanisius, Yogyakarta

_____, 2007, Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya", Kanisius, Yogyakarta

M.Mas'ud Said, 2008, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, UMM Press, Malang

Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung

Nuroholish Madjid, 2000. *Islam, Dokirln dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina

Paul Scholten, 1954, *Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Bugelijk Recht, Algemeen deel*, Zwolle: Tjeenk Willink

Philip Mawhod, 1983, Local Goverment in the Third Worl Experience of Tropical Africa, New York, John Wiley & Sons

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2012, *Ilmu Perundang-undangan*, Pustaka Setia, Bandung

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Sokanto, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung

Raco JR, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif:Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* , Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Reny Rawasita, et.al., 2009, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*,Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta

Ronny Hanitijio Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta

Rosjidi Ranggawidjaja, 1988, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung

Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, 1979, *Perihal Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung

_____, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Adiya Bakti, Bandung.

Syaiful Watni, dkk, 2006, *Kamus Hukum Umum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta

Tim Penyusun, 2015, *Modul Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan “Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Perundang-undangan”*, BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok

Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Citra Aditia, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

C. Jurnal/Majalah/Makalah

Bagir Manan, “Kosistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum”, *Majalah Varia Peradilan* No. 275 Oktober 2008

Bayu Dwi Anggono, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang penanggulangan Bencana”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.22 No. 2 Juni, FH UGM

Didik Sukriono, “Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah”, *Jurnal Hukum Adil* Vol.2 No. 2 Agustus 2011, Fakultas Hukum Yarsi Jakarta, hlm 168

Esmi Warassih P., 2001. "Fungsi Cita Hukum Dalam Penyusunan Peraturan Perundangan Yang Demokratis" dalam Arena Hukum Majalah Hukum FH Unibraw No. 15 tahun 4, November 2001

Syarif Hidayat, *Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah*, Jentera: Peraturan Daerah edisi 14 Tahun IV, Oktober-Desember 2006

Makalah Dr. kurniasih, S.H., M.Si. Masukan terhadap Buku Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, disampaikan pada kegiatan rapat revisi Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah, 20 November 2015

D. Internet

Hamzah Salim, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Teoritis menuju Artikulasi Empiris dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/17267/Buku%20Cara%20Praktis%20Menyusun%20%26%20Merancang%20PERDA.pdf?sequence=1>

Sri Hariningsih dalam
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/1944_Perumus%20Norma%20dalam%20Peraturan%20Perundang-undangan.pdf, diunduh pada 27 Mei 2016.

Zudan Arif Fakrulloh, *Simplifikasi dan Reformasi Regulasi di Era Otonomi Daerah* <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/244-simplifikasi-dan-reformasi-regulasi-di-era-otonomi-daerah.html>